



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KRISTRI WIDODO
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NHK : 416318

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 460.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 770 m2/200 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 682.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, VESPA MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 46.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 436.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.946.683.179

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.088.683.179

III. HUTANG Rp. 185.712.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.902.971.179

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI KURNIAWAN ENDAH SURYANI
2. Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU III
3. NHK : 773309

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	75.000.000
1. MOBIL, MITSUBISHI GRANDIS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.		
75.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	82.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.628.739
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	159.128.739
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	159.128.739

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIEF CHOTBANI**
2. Jabatan : **INSPEKTUR PEMBANTU IV**
3. NHK : **742401**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.300.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 540 m2/250 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 455 m2/36 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 127.500.000**

1. MOBIL, SUZUKI MPV Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, SANEX SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 25.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 4.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 49.950.642**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 1.481.950.642**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.481.950.642

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD FAHMY HIDAYAT
2. Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
3. NHK : 714384

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. ----

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 27.800.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 800.000
2. MOTOR, YAMAHA BJM A/T FILANO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 146.682.680

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 174.482.680

III. HUTANG

Rp. 145.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 29.482.680

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.